

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku Literatur

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Adiyta Bakti, 2004.
- Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisan Tentang Tanah, Bandung, Alumni, 1993.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Cet. 12, Jakarta, Djambatan, 2008.
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002.
- Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Effendi Perangin, Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta, Jakarta, Esa Suandi, 1981.
- Gunardi dan Markus, Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2008.
- J.J.J. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Jakarta, FE UI, 1996.
- Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ketiga, Malang, Banyumedia Publishing, 2007.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, CV. Bandar Maju, 1994.
- Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta, Andi, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Medan, Alumni, 1989.
- Maria SW. Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Muchtar Wahid, Memakai Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Suatu Analisa dengan Pendekatan Terpadu secara normative dan Sosiologis, Cet I, Jakarta, Republika, 2008.

- Mustofa, Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Yogyakarta, Karya Media, 2010.
- Otje Salman dan Anthon F, Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Pieter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, PT. Eresco Bandung, 1995.
- Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis (Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, Bandung, Refika Aditama, 1998.
- Sartono Kartodirdjo, Metodologi Penelitian Masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1983.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Ed.1, Cet. 10, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Siti Resmi, Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4, Jakarta, Salemba Empat, 2011.
- Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011.
- Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1993.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

#### **C. Tesis/Jurnal**

1. Muhammad Nasir, 2009, Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Penyetoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Negara, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2. Yumardi, 2010, Penghindaran terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) Dalam Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau Bangunan di Kota Padang, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

#### **D. Data Elektronik**

1. Anonim, PPh Pengalihan Tanah/Bangunan Turun Menjadi 2,5%–PP 34/2016, (<http://www.infopajak.id/pph-pengalihan-tanah-bangunan-turun-menjadi-25-pp-342016/>), diakses pada 2 Desember 2016.
2. Dudi Wahyudi, “Pajak: Pengertian dan Fungsinya”, (<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajakpenghasilan/pajak-pengertian-danfungsinya.html>)
3. Eddhi Wahyudi H, Pajak Penghasilan (PPh),(<https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/4-pajak-penghasilan-pph/>), diakses pada 2 Desember 2016.
4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016 Informasi APBN Disusun Oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, ([www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf)), diakses pada 2 Desember 2016

5. Patar Tambunan, Apa Itu NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), (<http://www.usahaproperti.com/apa-itu-njop-nilai-jual-objek-pajak/>), diakses pada 4 Desember 2016.

<sup>1</sup> Nasikhudin, **Tax Learning**

<http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=152>

